



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI  
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

---

- Tahun Sidang : 2021-2022
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke : 28 (dua puluh delapan)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI;  
2. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);  
3. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;  
4. Direksi BPJS Ketenagakerjaan;  
5. Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI);  
6. Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Selasa, 28 September 2021
- Pukul : 10.00 WIB – selesai
- Acara : 1. Penjelasan pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK dalam masa Pandemi *Covid-19*;  
2. Penjelasan pengawasan atas program-program bantuan BPJS Ketenagakerjaan dalam meringankan beban pekerja/buruh korban PHK dan di rumahkan pada masa Pandemi *Covid-19*.
- Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Dilanjutkan oleh: H. Ansory Siregar, Lc./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Peserta Rapat : A. Fisik. 13 orang Virtual 20 orang dari 50 orang Anggota  
Hadir dan Virtual Komisi IX DPR RI;

- B. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI: Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus.;
- C. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN): Ir. Tubagus Achmad Choesni, MA., M.Phill.;
- D. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan: Muhammad Zuhri Bahri;
- E. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo;
- F. Sekjen Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI): Hermanto Achmad;
- G. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI): Elly Rosita.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Diresi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dibuka pukul 10.40 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan evaluasi dan review regulasi terkait besaran manfaat Jaminan Pensiun yang hanya Rp.300.000 sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara klaim program JHT dan Program Jaminan Pensiun.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun tata kelola data sehingga seluruh manfaat jaminan sosial dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
4. Sehubungan dengan sisa anggaran BSU Tahun 2021 sebesar Rp1,791 Triliun, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut dengan memperluas kepesertaan dan cakupan wilayah penerima bantuan secara nasional.

5. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) lebih aktif dalam melakukan pengawasan integrasi data jaminan sosial mulai Validasi data hingga verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
6. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan program aplikasi BPJS Ketenagakerjaan dengan memperkaya pilihan aplikasi guna memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan dan aksesibilitas baik dalam kepesertaan maupun klaim program.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 28 September 2021

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



H. ANSORY SIREGAR, Lc.

A-414